

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Surabaya.
- Agus Dwiyanto *et al.* 2007. *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*. PSKK UGM bekerjasama dengan kemitraan. Yogyakarta.
- Albi Anggito Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak. Jawa Barat.
- Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenamedia Group. Jakarta.
- , 2020. *Perbuatan Hukum Pemeritahan*. Phinatama Media. Makassar.
- Askari Razak. 2013. *Hukum Pelayanan Publik*. Arus Timur. Makassar.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Christine S.T. Kansil. 2014. *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor Selatan.
- Ismail Nurdin. 2019. *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik)*. Media Sahabat Cendekia. Surabaya.
- M. Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Total Media. Yogyakarta.
- Miftah Thoha. 2018. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana. Jakarta.
- Nani Soewondo *et al.* 1983. *Pengantar Hukum dan Kependudukan*. Konsorsium Ilmu Hukum Bekerja sama dengan BKKBN. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon *et al.* 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

- Rahman Mulyawan. 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Unpad Press. Jawa Barat.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 2018. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Said Sampara et al. 2017. *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kretakupa Print. Makassar.
- Sirajuddin et al. 2012. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. Setara Press. Malang.
- Sri Maulidiah. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. CV. Indra Prahasta. Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeda. Depok.
- Syafaruddin et al. 2012. *Inovasi Pendidikan (Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan)*. Perdana Publishing. Medan.
- Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
- Yogi Suwarno. 2008. *Inovasi Di Sektor Publik*. Stia-LAN Press. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal dan Artikel

- Abdul Razak. 2005. "Peraturan Kebijakan sebagai Instrumen Pemerintahan". Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP. Dosen Fakultas Hukum Unhas. Volume 13 Nomor 2, Juni 2005.
- Andi Bau Inggit, Abdul Razak, Anshory Ilyas. 2014. "Hakikat Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Makassar". Jurnal Analisis, Bagian Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Unhas. Vol 3 Nomor 1 : 1-1, Juni 2014.
- Aron Sebastian. 2019. "Inovasi Pelayanan SIM Booking di Satlantas Polres Kudus." Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 1 Nomor 2.
- Aris. "Launching SP2020, Disdukcapil Bulukumba Gelar Layanan Jempol." Artikel Panrita News (Online), diakses pada 10/04/2022 (Pukul 11.14)

- Mudazzir Munsyir, Marthen Arie, Hamzah Halim. 2013. "Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat". Jurnal Penelitian Hukum. Fakultas Hukum Unhas. Volume 2 Nomor 3, Mei 2013.
- Muhammad Bobby Kurniawan, Artikel: *Pelayanan E-KTP Jemput Bola (Studi Kasus Desa Sumber Canting Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Jember.
- Veronica A Suwandiy. 2019. "Inovasi Pelayanan "Jemput Bola Terpadu" dalam Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo." Public Administration Journal Volume 1 Nomor 3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Widad Alfizzah Shabrina. 2019. *Pelaksanaan Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya*. Jurnal Administrasi Negara. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Zulkifli Aspan et.al. 2019. "Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivikasi dari Hak Menguasai Negara". Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review. Fakultas Hukum Unhas, Vol 1 Nomor 1, Januari 2019.

Skripsi

- Dwi Siti Hutami Ibam Putri. 2017. "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelayanan Publik dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Enrekang*." Skripsi Sarjana Hukum. Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Firman.P. 2017. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Administrasi Negara (Studi Kasus Kabupaten Bulukumba)*." Skripsi Sarjana Hukum. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Sumber Lain

- Berita Resmi Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Bulukumba, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba <https://bulukumbakab.bps.go.id/pressrelease/2021/08/13/80/ha>

[sil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-bulukumba.html](#) (Koran Online). Diakses pada 04/10/2022 (Pukul 22.00)

Data Agrerat kependudukan Kabupaten Bulukumba Semester I dan II oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba

Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021. Diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga,

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2015 atas Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba

LAMPIRAN

1.1. Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 30 Agustus 2022

Nomor : 531/DPMTSPTK/VIII/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba
2. Camat Se Kab. Bulukumba
Masing – Masing
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/695/Kesbangpol/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :


Nama : ZULFANI DWI PUTRI
Nomor Pokok : B021181006
Program Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Institusi : UNHAS MAKASSAR
Alamat : JL. KACONG DAENG LALANG TOMBOLO, GOWA

Bermaksud melakukan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan Se Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan judul "KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM INOVASI LAYANAN JEMPUT BOLA PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 29 Agustus s.d 31 Oktober 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang telah diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


FERRYWAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19820212 200212 1 001

Tembusan:
1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsin

1.2. Surat Edaran Pelaksanaan Jemput Bola



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 471.13/24150/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelayanan Jemput Bola
Perekaman KTP-el
Serentak Secara Nasional.

Kepada.
Yth. Sdr. Bupati/Walikota
di-
SELURUH INDONESIA

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka pemenuhan hak konstitusional bagi para pemilih, agar Saudara menginstruksikan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk **bergerak serentak** melakukan layanan jemput bola perekaman KTP-el di 514 Kabupaten/Kota, pada:

hari : Kamis
tanggal : 27 Desember 2018
waktu : pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan selesai.

Perekaman diarahkan kepada pemilih pemula di SMU, SMK, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren atau pemilih yang ada di Rutan dan Lapas serta tempat lain yang memiliki jumlah pemilih yang terkonsentrasi seperti perusahaan dan perkantoran.

Hasil pelaksanaan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota seluruh Indonesia



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 06 Maret 2019

Nomor : 471-13 / 2100 / Dnsk-epn1
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : **Pelayanan Jemput Bola
Perekaman KTP-el Goes to
Campus/School**

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka pemenuhan hak konstitusional bagi para pemilih, agar Saudara menginstruksikan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk bergerak serentak melakukan layanan jemput bola perekaman KTP-el *Goes to Campus/School* di 514 Kabupaten/Kota, pada tanggal 11 s/d 16 Maret 2019.

Perekaman diarahkan kepada pemilih pemula di Perguruan Tinggi, SMU, SMK, dan tempat lain yang memiliki jumlah pemilih pemula yang terkonsentrasi. Bagi daerah yang tidak memiliki Perguruan Tinggi kegiatan diarahkan ke SMU, SMK, atau sekolah yang sederajat.

Hasil pelaksanaan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan) ;
2. Kepala Unit Kerja yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Provinsi Seluruh Indonesia ;
3. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Januari 2019

Nomor : 471.13/539/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Gerakan Nasional Jemput
Bola Serentak KTP-el di
Lapas/ Rutan

Yth. Bupati/Walikota
di

SELURUH INDONESIA

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), khususnya untuk pemenuhan kepemilikan KTP elektronik bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), sekaligus untuk mendukung terpenuhinya syarat hak konstitusional pemilih dalam Pemilihan Presiden tahun 2019, **akan dilaksanakan Gerakan Nasional Jemput Bola Serentak di lapas/rutan seluruh Indonesia pada tanggal 17 s.d 19 Januari 2019.**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bupati/Walikota untuk dapat menugaskan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota guna mempersiapkan dan melaksanakan gerakan nasional jemput bola serentak tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Lapas/Rutan di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing;
2. Mempersiapkan peralatan dan SDM untuk kegiatan jemput bola serentak dalam perekaman KTP-el di lapas/rutan;
3. Melaporkan hasil kegiatan jemput bola serentak tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan kepada Gubernur di wilayah masing-masing.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

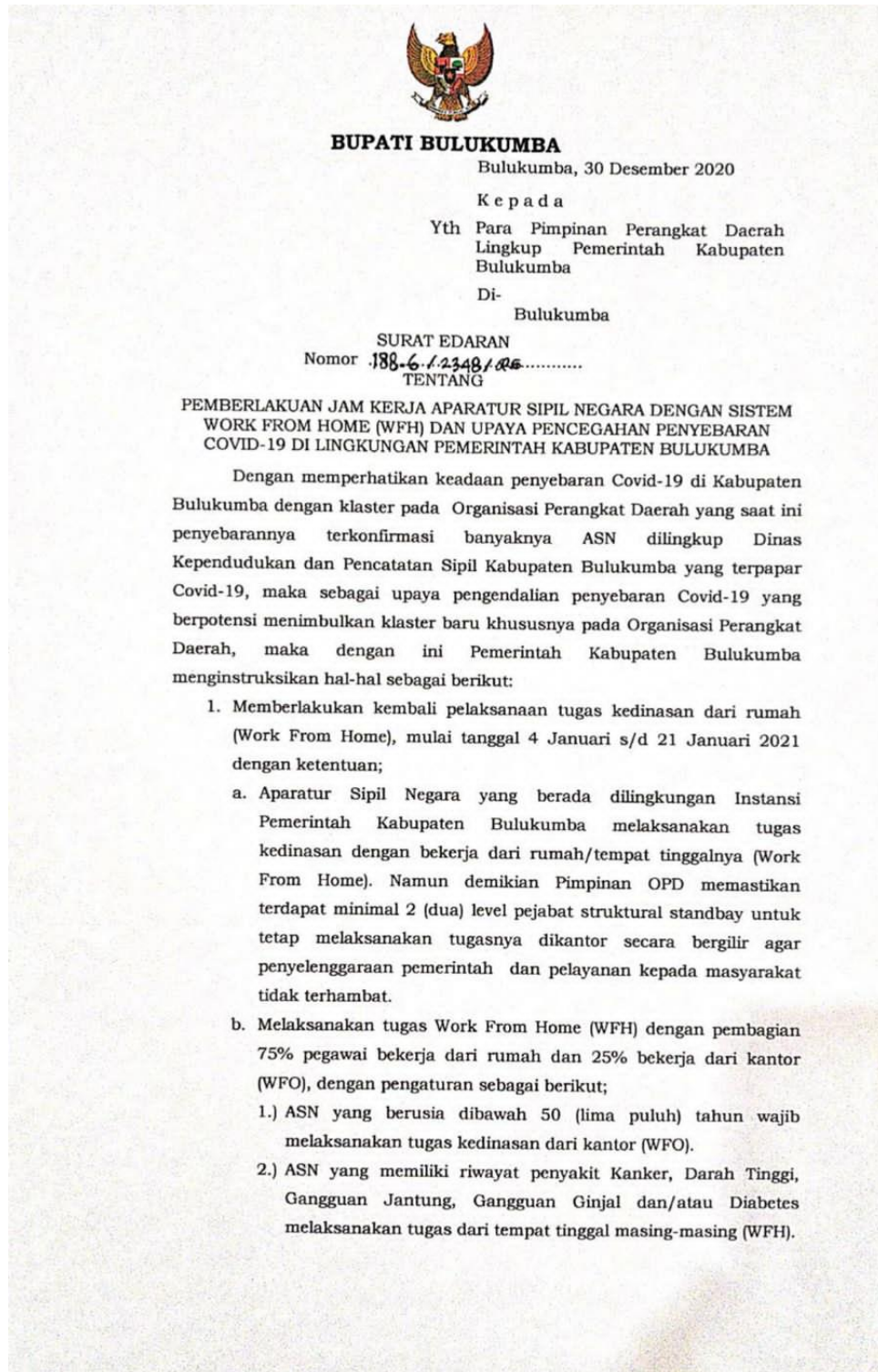


Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 196908241999031001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan); *
2. Gubernur Seluruh Indonesia.

1.3. Surat Edaran *Work From Home* Bupati Bulukumba



- 3.) Bagi ASN yang berusia 50 (lima puluh) tahun keatas dan ASN wanita yang sedang mengandung melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.
- c. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (WFH) sewaktu-waktu dapat dipanggil kekantor apabila dibutuhkan.
2. Apabila terdapat ASN pada perangkat Daerah yang terindikasi terpapar Covid-19 agar Pimpinan Perangkat Daerah segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan test PCR dan dilaksanakan secara berkala.
 3. Melakukan penyemprotan Disinfektan secara berkala di kantor masing-masing dan berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bulukumba.
 4. Membatasi perjalanan dinas daerah dan keluar daerah.
 5. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia dan apabila harus diselenggarakan rapat/atau kegiatan lainnya dikantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (Social Distancing) dan tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.
 6. Agar tetap mematuhi protokol kesehatan setiap beraktifitas.

Demikian untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab


BUPATI BULUKUMBA
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten; dan
4. Arsip

1.4. Surat Keterangan Wawancara dan Persetujuan Menjadi Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI NURHIKMAH, S.H., M.H.

Pekerjaan/Jabatan : KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA & INOVASI PELAYANAN

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Zulfani Dwi Putri

NIM : B021181006

Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum Administrasi Negara

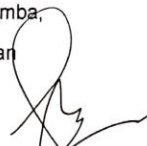
Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal , bertempat di

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten Bulukumba.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan



ANDI NURHIKMAH, S.H., M.H.

Nip. 19790912 200604 2 013

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Zulfani Dwi Putri yang berjudul **Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten Bulukumba.**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan


ANDI NURHIKMAH, SH. MH

Nip. 19790912 200604 2013

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endang Muhiyati, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Analis Kebijakan / Kasi Inovasi

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

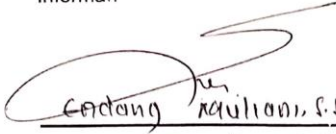
Nama : Zulfani Dwi Putri
NIM : B021181006
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
bertempat di

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten Bulukumba.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,
Informan


Endang Muhiyati, S.Sos
Nip. 197202021992032022

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

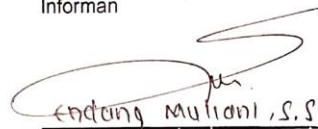
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Zulfani Dwi Putri** yang berjudul **Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten Bulukumba.**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan


Endang Muliani, S.Sos

Nip. 19720202 1992032022

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURAFIAH, S.Kom

Pekerjaan/Jabatan : ANALIS DATA DAN INFORMASI

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Zulfani Dwi Putri

NIM : B021181006

Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
bertempat di

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten Bulukumba.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan



NURAFIAH, S.Kom

Nip. 198902152020122003

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Zulfani Dwi Putri** yang berjudul **Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten Bulukumba.**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan



NURAFIAH

Nip. 198902152000122005

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUHERMAN
Pekerjaan/Jabatan : Ketua PDD

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Zulfani Dwi Putri
NIM : B021181006
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal , bertempat di

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten Bulukumba.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan



SUHERMAN

Nip.



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Zulfani Dwi Putri** yang berjudul **Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten Bulukumba.**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan



SUHERMAN

Nip.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANOI USMAN
Pekerjaan/Jabatan : PETANI / PEKEBUN

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Zulfani Dwi Putri
NIM : B021181006
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal _____ bertempat di _____

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten Bulukumba.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,
Informan

U)
ANOI USMAN

Nip.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Zulfani Dwi Putri** yang berjudul **Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten Bulukumba.**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan



ANDI USMAN

Nip.

1.5. Dokumentasi Penelitian



